

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abidin. 2021. Efektivitas Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Progresif.

Jakarta: Prenadamedia Group.

Agus Rahardjo. 2013. Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Jakarta: Pustaka LP3ES.

Agus Santoso. 2018. Penyelesaian Korupsi melalui Pemidanaan

Tambahan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Amiruddin. 2020. Hukum Ekonomi dan Kejahatan Korporasi. Jakarta:

Rajawali Pers.

Arief. 2019. Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Budaya. Malang: Intrans

Publishing.

B.N. Arif. 2020. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Hukum

dan Kebijakan. Jakarta: Prenada Media.

David O. Friedrichs. 2010. Trusted Criminals: White Collar Crime in

Contemporary Society. Belmont: Wadsworth Publishing.

Edwin H. Sutherland. 1949. White Collar Crime. New York: Dryden Press.

H. Dahlan. 2017. Penerapan Pemidanaan Non-Konvensional dalam Tindak

Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap. 2021. Etika Pemerintahan dan Tindak Korupsi. Jakarta: Prenada

Media.

- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- J.C. Sharman. 2012. The Money Laundry: Regulating Criminal Finance in the Global Economy. Ithaca: Cornell University Press.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Lubis. 2019. Tanggung Jawab Negara atas Korupsi Pejabat. Bandung: Pustaka Baru.
- M. Lubis. 2019. Aset Recovery dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. 2020. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurul Hidayat. 2019. Strategi Pemulihan Keuangan Negara pada Kasus Korupsi. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- R. Djiwandono. 2015. Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo. 2018. Inovasi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto. 2022. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

Syarifuddin. 2017. Hukum Pidana: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

## **JURNAL**

A. Suyudi. 2020. Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Pembangunan. Volume 20 Nomor 2.

Andi Wibowo. 2021. *The Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Comparative Study between Indonesia and Singapore*. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 15 No. 1.

Chong Wei Liang. 2020. *Asset Recovery Practices in Singapore's CPIB*.

Singapore Law Review, Vol. 32 No. 3.

Indrawati Sudibyo. 2012. Dampak Korupsi terhadap Kesejahteraan

Masyarakat. Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial. Volume 10

Nomor 1.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan*

*Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana, hlm. 133.

Khoirul Umam. 2012. Pengembalian Kepercayaan Publik Melalui Reformasi

Sistem Antikorupsi. Jurnal Hukum Prioris. Volume 3 Nomor 2.

Lestari Santoso. 2022. *Implementasi UU TPPU Pasal 76B: Tantangan dan*

*Peluang*. Jurnal Kepatuhan Hukum, Vol. 8 No. 4.

Matondang MMS et al. 2024. Law Enforcement against Corruption Crimes

in Indonesia. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Indonesia. Volume 3.

Maya Fitria. 2024. *Reverse Onus Clauses in Asset Forfeiture: International*

*Best Practices*. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 16 No. 2

Mustofa Abdullah. 2014. Efek Domino Korupsi terhadap Ekonomi Negara.

Jurnal Ekonomi dan Hukum. Volume 5 Nomor 1.

Paolo Mauro. 1995. Corruption and Growth. The Quarterly Journal of

Economics. Volume 110 Nomor 3.

Resti Pratiwi. 2020. Tantangan Penerapan Pemidanaan Non-Konvensional dalam Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*. Volume 17 Nomor 1.

Rudi Hartono. 2023. *Draft Indonesian Asset Recovery Bill: Centralizing Enforcement in BPAN*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2.

Siti Noor Laila. 2015. Penyebab dan Dampak Sistemik Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Volume 1 Nomor 2.

Sri Utami. 2019. *Civil Forfeiture in Indonesian Anti-Money Laundering Law*. *Jurnal Kriminalitas*, Vol. 10 No. 2.

Taufik Rachman. 2017. Non-Konventional Penalties in Corruption Crime in Indonesia: A Legal Analysis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 52 Nomor 3.

Yuliana Rosita. 2020. Evaluasi Pemulihan Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 21 Nomor 1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **Laporan dan Publikasi Lembaga**

Asian Development Bank (ADB). 2014. Governance and Corruption Control in Asia. Manila: ADB Publications.

Bank Indonesia. 2022. Laporan Efektivitas UU TPPU dalam Pemberantasan Pencucian Uang. Jakarta: BI Publications.

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). 2022. Annual Report 2022. Singapore: CPIB.

Indonesian Corruption Watch (ICW). 2023. Laporan Pemantauan Eksekusi Putusan Korupsi. Jakarta: ICW.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2023. Statistik Eksekusi Putusan Korupsi 2019-2023. Jakarta: KPK.

PPATK. 2023. Kapasitas SDM Penegak Hukum dalam Pelacakan Aset.

Jakarta: PPATK.

Transparency International. 2014. Corruption Perceptions Index 2014.

Berlin: TI Secretariat.

Transparency International. 2020. Corruption Perceptions Index 2020.

Berlin: TI Secretariat.

Transparency International. 2022. Global Corruption Barometer: Asia

Pacific. Berlin: TI Secretariat.

World Bank. 1997. Helping Countries Combat Corruption: The Role of the

World Bank. Washington, D.C.: World Bank Publications.

World Bank. 2020. Asset Recovery in Corruption Cases: Lessons from

Indonesia. Washington, DC: World Bank Publications.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Perkara Nomor 05/PID.SUS-TPK/2009/PN.JKT.SEL (Kasus Bank

Bali).

Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST (Kasus

Jiwasraya).

Putusan Perkara Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.SEL (Kasus e-

KTP).

Putusan Perkara Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.SEL (Kasus Korupsi Bansos COVID-19).

Putusan PN Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS-TPK/2021 (Kasus PT Asabri).

Putusan PN Jakarta Pusat No. 30/PDT.G/2022/PN.JKT.PST (Gugatan Perdata Dana Desa).

Putusan PN Jakarta Selatan No. 45/PID.SUS-TPK/2022 (Kasus Garuda Indonesia).

Putusan PN Pekanbaru No. 08/PID.SUS-TPK/2023 (Kasus PLTU Riau-1).

Putusan PN Surabaya No. 45/PID.SUS-TPK/2022 (Kasus Korupsi APBD Jawa Timur).

### **Sumber Internasional**

*Legislative Decree No. 190/2012 (Italy) on Anti-Corruption Measures.*

*Legislative Decree No. 274/2000 (Italy) on Lavori di Pubblica Utilità.*

*U.S. Department of Justice (DOJ). 2021. Fraud Statistics Overview 2021.*

*Washington, DC: DOJ.*